



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur pencapaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur penetapan jumlah Target Penerimaan Daerah setiap triwulan pada tahun anggaran 2025.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk penghitungan jumlah persentase capaian Target Penerimaan Daerah setiap triwulan guna mengoptimalkan capaian Target Pajak dan Retribusi sebagai pedoman penyusunan Keputusan Bupati tentang pembagian Insentif Pajak dan Retribusi.

BAB II

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Penetapan Target penerimaan Pajak setiap triwulan tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Target penerimaan Retribusi setiap triwulan tahun anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Target penerimaan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercapai, perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retribusi dapat diberikan Insentif.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berkenaan dapat dibayarkan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI BULELENG,
Ttd.
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Made Bayu Waringin S.H., M.H.
Nip. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH SETIAP TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS PAJAK	TARGET INDUK TH 2025	INSENTIF INDUK 5%	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	PAJAK REKLAME	4,973,534,480.00	248,676,724.00	15	746,030,172.00	40	1,989,413,792.00	75	3,730,150,860.00	100	4,973,534,480.00
2	PAJAK AIR TANAH	2,000,000,000.00	100,000,000.00	15	300,000,000.00	40	800,000,000.00	75	1,500,000,000.00	100	2,000,000,000.00
3	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	500,000,000.00	25,000,000.00	15	75,000,000.00	40	200,000,000.00	75	375,000,000.00	100	500,000,000.00
4	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	27,500,000,000.00	1,375,000,000.00	15	4,125,000,000.00	40	11,000,000,000.00	75	20,625,000,000.00	100	27,500,000,000.00
5	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	57,500,000,000.00	2,875,000,000.00	15	8,625,000,000.00	40	23,000,000,000.00	75	43,125,000,000.00	100	57,500,000,000.00
	PBJT atas:										
6	PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	37,500,000,000.00	1,875,000,000.00	15	5,625,000,000.00	40	15,000,000,000.00	75	28,125,000,000.00	100	37,500,000,000.00
7	PBJT TENAGA LISTRIK	55,000,000,000.00	2,750,000,000.00	15	8,250,000,000.00	40	22,000,000,000.00	75	41,250,000,000.00	100	55,000,000,000.00

NO	JENIS PAJAK	TARGET INDUK TH 2025	INSENTIF INDUK 5%	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
8	PBJT JASA PERHOTELAN	47,500,000,000.00	2,375,000,000.00	15	7,125,000,000.00	40	19,000,000,000.00	75	35,625,000,000.00	100	47,500,000,000.00
9	PBJT JASA PARKIR	100,000,000.00	5,000,000.00	15	15,000,000.00	40	40,000,000.00	75	75,000,000.00	100	100,000,000.00
10	PBJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN	4,000,000,000.00	200,000,000.00	15	600,000,000.00	40	1,600,000,000.00	75	3,000,000,000.00	100	4,000,000,000.00
11	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	63,043,712,348.00	3,152,185,617.40	15	9,456,556,852.20	40	25,217,484,939.20	75	47,282,784,261.00	100	63,043,712,348.00
12	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	65,708,253,977.00	3,285,412,698.85	15	9,856,238,096.55	40	26,283,301,590.80	75	49,281,190,482.75	100	65,708,253,977.00
JUMLAH		365,325,500,805.00	18,266,275,040.25		54,798,825,120.75		146,130,200,322.00		273,994,125,603.75		365,325,500,805.00

Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET INDUK TH 2025	INSENTIF INDUK 5%	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
				%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1	PELAYANAN KESEHATAN	261,686,156,000.00	13,084,307,800.00	15	39,252,923,400.00	40	104,674,462,400.00	75	196,264,617,000.00	100	261,686,156,000.00
	PELAYANAN KEBERSIHAN atas:		-		-		-		-		-
2	PELAYANAN PERSAMPAHAN	3,005,029,000.00	150,251,450.00	15	450,754,350.00	40	1,202,011,600.00	75	2,253,771,750.00	100	3,005,029,000.00
3	PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	125,000,000.00	6,250,000.00	15	18,750,000.00	40	50,000,000.00	75	93,750,000.00	100	125,000,000.00
4	PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	3,750,000,000.00	187,500,000.00	15	562,500,000.00	40	1,500,000,000.00	75	2,812,500,000.00	100	3,750,000,000.00
5	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH	59,700,000.00	2,985,000.00	15	8,955,000.00	40	23,880,000.00	75	44,775,000.00	100	59,700,000.00

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET INDUK	INSENTIF INDUK	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
		TH 2025	5%	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
6	PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR, GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA	199,980,000.00	9,999,000.00	15	29,997,000.00	40	79,992,000.00	75	149,985,000.00	100	199,980,000.00
7	PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN	593,343,000.00	29,667,150.00	15	89,001,450.00	40	237,337,200.00	75	445,007,250.00	100	593,343,000.00
8	PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK	90,000,000.00	4,500,000.00	15	13,500,000.00	40	36,000,000.00	75	67,500,000.00	100	90,000,000.00
9	PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA	8,126,000,000.00	406,300,000.00	15	1,218,900,000.00	40	3,250,400,000.00	75	6,094,500,000.00	100	8,126,000,000.00
10	PEMANFAATAN ASET DAERAH	2,114,027,000.00	105,701,350.00	15	317,104,050.00	40	845,610,800.00	75	1,585,520,250.00	100	2,114,027,000.00
11	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	4,500,000,000.00	225,000,000.00	15	675,000,000.00	40	1,800,000,000.00	75	3,375,000,000.00	100	4,500,000,000.00
12	PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)	1,700,000,000.00	85,000,000.00	15	255,000,000.00	40	680,000,000.00	75	1,275,000,000.00	100	1,700,000,000.00
JUMLAH		285,949,235,000.00	14,297,461,750.00		42,892,385,250.00		114,379,694,000.00		214,461,926,250.00		285,949,235,000.00

Pj. BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA